

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

23. Penandaan Pengendalian Inflasi Provinsi

No	Kode					Nomenklatur	Strategi
	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	1	03	02	1,01	0005	Pembangunan Bendungan	K2
2	1	03	02	1,01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	K2
3	1	03	02	1,01	0071	Rehabilitasi Bendungan	K2
4	1	03	02	1,01	0134	Rehabilitasi Embung	K2
5	1	03	02	1,01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	K2
6	1	03	02	1,02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
7	1	03	02	1,02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	K2
8	1	03	02	1,02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	K2
9	1	03	02	1,02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	K2
10	1	03	02	1,02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
11	1	03	02	1,02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
12	1	03	02	1,02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	K2
13	1	03	02	1,02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	K2
14	1	03	02	1,02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	K2
15	1	03	02	1,02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
16	1	03	02	1,02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	K2
17	1	03	02	1,02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	K2
18	1	03	02	1,02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	K2
19	1	03	02	1,02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	K2
20	1	03	02	1,02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
21	1	03	02	1,02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
22	1	03	02	1,02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	K2
23	1	03	02	1,02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	K2
24	1	03	02	1,02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	K2
25	1	03	02	1,02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
26	1	03	02	1,02	0042	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
27	1	03	02	1,02	0040	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
28	1	03	02	1,02	0041	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
29	1	03	02	1,02	0044	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
30	1	03	02	1,02	0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	K2
31	1	03	10	1,01	0052	Rehabilitasi Jembatan	K3
32	1	03	10	1,01	0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan	K3
33	1	03	10	1,01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	K3
34	1	03	10	1,01	0049	Pelebaran Jembatan	K3
35	1	03	10	1,01	0030	Rehabilitasi Jalan	K3
36	1	03	10	1,01	0031	Rekonstruksi Jalan	K3
37	1	03	10	1,01	0054	Pembangunan Jembatan	K3
38	1	03	10	1,01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	K3
39	1	03	10	1,01	0050	Pembangunan Terowongan/Tunnel	K3
40	1	03	10	1,01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	K3
41	1	03	10	1,01	0046	Penggantian Jembatan	K3
42	1	03	10	1,01	0048	Pembangunan Underpass	K3
43	1	03	10	1,01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	K3
44	1	03	10	1,01	0055	Pembangunan Flyover	K3
45	1	03	10	1,01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	K3
46	1	06	05	3,03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	K1
47	2	07	05	1,03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	K1
48	2	09	02	1,01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	K2
49	2	09	02	1,01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	K4
50	2	09	02	1,01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K3
51	2	09	03	1,01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K2
52	2	09	03	1,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	K4
53	2	09	03	1,01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K2
54	2	09	03	1,01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	K4
55	2	09	03	1,01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	K1
56	2	09	03	1,01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	K3
57	2	09	03	1,01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	K4
58	2	09	03	1,01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	K4
59	2	09	03	1,02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	K4
60	2	09	03	1,02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K2

No	Kode					Nomenklatur	Strategi
	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
61	2	09	03	1,02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K1
62	2	09	03	1,02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K2
63	2	09	03	1,02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K4
64	2	09	03	1,03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	K1
65	2	09	03	1,04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K4
66	2	09	04	1,02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K2
67	2	11	03	1,01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	K2
68	2	15	02	1,02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	K3
69	2	15	02	1,05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	K3
70	2	15	02	1,08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	K3
71	2	15	02	1,10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	K4
72	2	15	02	1,10	0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	K3
73	2	15	02	1,11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	K4
74	2	15	02	1,15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1
75	2	15	02	1,15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K4
76	2	15	02	1,15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1
77	2	15	03	1,03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	K4
78	2	15	03	1,07	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K1
79	2	15	03	1,07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K4
80	2	15	03	1,07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K1
81	2	15	03	1,09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	K3
82	2	15	03	1,10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K3
83	2	15	04	3,01	0006	Pengelolaan Bandara	K3
84	2	15	04	4,01	0006	Pengelolaan Bandara	K3
85	2	15	04	3,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	K3
86	2	15	04	4,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	K3
87	2	15	04	3,02	0002	Pembangunan Bandar Udara	K3
88	2	15	04	4,02	0002	Pembangunan Bandar Udara	K3
89	2	15	04	3,06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	K4
90	2	15	04	4,06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	K4
91	2	15	05	1,03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	K3
92	2	15	05	1,06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	K3
93	2	15	04	3,08	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	K3
94	2	15	05	4,09	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	K3
95	2	16	03	3,01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	K3
96	2	16	03	4,01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	K3
97	2	16	03	3,01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	K2
98	2	16	03	4,01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	K2

No	Kode					Nomenklatur	Strategi
	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
99	2	22	08	5,08	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	K2
100	3	25	03	1,01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	K4
101	3	25	03	1,01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	K2
102	3	25	03	1,02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	K4
103	3	25	03	1,06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	K3
104	3	25	03	1,02	0004	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	K2
105	3	25	03	3,11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan	K4
106	3	25	03	4,11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan	K4
107	3	25	03	3,12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K2
108	3	25	03	4,12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K2
109	3	25	03	3,12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K4
110	3	25	03	4,12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K4
111	3	25	03	3,16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan	K2
112	3	25	03	4,16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan	K2
113	3	25	04	1,05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K4
114	3	25	04	1,05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	K2
115	3	25	04	1,05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	K2
116	3	25	04	1,05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	K2
117	3	25	04	1,05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K2
118	3	25	04	1,06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K2
119	3	25	04	1,06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K2
120	3	25	06	1,01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K4
121	3	25	06	1,03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K2
122	3	25	06	3,04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	K2
123	3	25	06	4,04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	K2
124	3	25	06	3,06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K3
125	3	25	06	4,06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K3
126	3	25	06	3,07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
127	3	25	06	4,07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	K2

No	Kode					Nomenklatur	Strategi
	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
128	3	25	06	3,09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
129	3	25	06	4,09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
130	3	27	02	1,01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	K2
131	3	27	02	1,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	K2
132	3	27	02	1,01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	K2
133	3	27	02	1,01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	K2
134	3	27	02	1,01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	K2
135	3	27	02	1,01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	K2
136	3	27	02	1,02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	K2
137	3	27	02	1,02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	K2
138	3	27	02	1,02	0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	K2
139	3	27	02	1,02	0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	K2
140	3	27	02	1,02	0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	K2
141	3	27	02	1,02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	K2
142	3	27	02	1,02	0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	K2
143	3	27	02	1,02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	K2
144	3	27	02	1,02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	K2
145	3	27	02	1,04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	K2
146	3	27	02	1,04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	K2
147	3	27	02	1,05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	K2
148	3	27	02	1,05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	K2
149	3	27	02	1,05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	K2
150	3	27	02	1,07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
151	3	27	02	1,07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
152	3	27	02	1,07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
153	3	27	03	1,01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	K2
154	3	27	03	1,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	K2
155	3	27	03	1,01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	K2
156	3	27	03	1,01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	K2
157	3	27	03	1,01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	K2
158	3	27	03	1,01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	K2
159	3	27	03	1,01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	K2
160	3	27	03	1,02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	K2
161	3	27	03	1,02	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	K2
162	3	27	04	1,03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	K2
163	3	27	05	1,01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
164	3	27	05	1,01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
165	3	27	05	1,01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
166	3	27	05	1,01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	K2
167	3	27	07	1,01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	K2
168	3	27	07	1,01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	K2
169	3	27	07	1,02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	K2
170	3	27	07	1,02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	K2
171	3	27	07	1,03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	K2
172	3	27	07	1,03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	K2
173	3	28	03	1,09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	K2
174	3	28	03	1,09	0006	Pembangunan Sumber Benih	K2
175	3	29	04	3,11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua	K2
176	3	29	04	3,12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	K2
177	3	29	04	4,11	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua Barat	K2
178	3	29	04	4,12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	K2

No	Kode					Nomenklatur	Strategi
	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
179	3	29	05	3,08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	K2
180	3	29	05	4,08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	K2
181	3	29	05	1,03	0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	K2
182	3	29	05	1,06	0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	K2
183	3	29	05	1,07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	K4
184	3	30	03	1,01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	K3
185	3	30	03	1,01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	K3
186	3	30	03	1,01	0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing- masing kabupaten/kota dalam provinsi	K3
187	3	30	04	1,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	K4
188	3	30	04	1,02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	K4
189	3	30	04	1,02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1
190	3	30	04	1,03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	K2
191	3	30	04	1,03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	K2
192	3	30	03	3,01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	K3
193	3	30	03	4,01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	K3
194	3	30	04	3,01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	K3
195	3	30	04	4,01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	K3
196	3	31	02	3,01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	K2
197	3	31	02	4,01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	K2
198	4	01	03	1,03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	K3
199	5	01	02	1,03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	K3

Ket:

K1: Keterjangkauan Harga

K2: Ketersediaan Pasokan

K3: Kelancaran Distribusi

K4: Komunikasi Efektif